

PERAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL DALAM MENGATASI KETIDAKSETARAAN GLOBAL

Annisa Nur Fauziah Bastaman
annisanfb30@gmail.com
Universitas Sebelas Maret

ABSTRAK

Artikel ini membahas pentingnya peran hukum hak asasi manusia internasional dalam mengatasi kesenjangan global. Penekanannya adalah pada penghapusan diskriminasi, akses yang setara terhadap pendidikan, perlindungan hak-hak ekonomi dan sosial, dan peningkatan kerja sama internasional. Hal ini mencakup tantangan implementasi seperti pendidikan publik, penguatan institusi hukum, partisipasi masyarakat sipil, dan evaluasi berkala. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat menciptakan dunia yang lebih adil, inklusif, dan setara bagi semua orang.

Kata Kunci: Standar hak asasi manusia internasional, Kesenjangan global, Diskriminasi, Akses terhadap pendidikan, Hak ekonomi dan sosial, Kerjasama internasional, Pendidikan publik, penguatan sistem hukum, Partisipasi masyarakat sipil, Evaluasi sehari-hari.

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia internasional penting dalam perjuangan melawan kesenjangan global. Kesenjangan global mempengaruhi akses keadilan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.

Ini melanggar prinsip dasar kemanusiaan dan menghambat pembangunan berkelanjutan. HAM internasional memberikan hak-hak dasar tanpa memandang ras, agama, gender, atau status sosial, termasuk Deklarasi Universal HAM dan perjanjian lainnya. Tujuannya adalah melindungi martabat, kebebasan, dan kesetaraan serta melawan kesenjangan global dengan mengakui hak atas kesetaraan dan melarang diskriminasi. Hukum HAM internasional menetapkan dasar hukum kuat dan menuntut pertanggungjawaban negara dalam melindungi HAM. Di negara bangkrut, individu dapat mengajukan pengaduan ke organisasi internasional. Meskipun penting, implementasi membutuhkan komitmen politik, kerja sama internasional, dan partisipasi aktif semua pihak. Standar HAM internasional penting untuk mengatasi kesenjangan global.

Ketimpangan global menghambat akses keadilan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan; melanggar prinsip dasar kemanusiaan dan pembangunan.

Hukum hak asasi manusia internasional melindungi martabat, kebebasan, dan kesetaraan manusia tanpa memandang ras, agama, gender, atau status sosial.

Undang-undang ini melawan kesenjangan global, menegaskan hak atas kesetaraan, dan melarang diskriminasi. Hak asasi manusia internasional: memberi negara landasan hukum dan tanggung jawab melindungi hak asasi manusia. Jika negara bangkrut, individu bisa mengajukan pengaduan ke organisasi internasional. Namun, ini memerlukan komitmen politik, kerja sama internasional, dan partisipasi pemangku kepentingan.

Standar HAM internasional diperlukan untuk melawan ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Ini tentang kesetaraan hak dasar seperti pendidikan, perumahan, pangan, air bersih, dan kesehatan. Diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, orientasi seksual, dan status sosial dilarang. Kita perlu menciptakan kerangka tanggung jawab nasional untuk melindungi hak asasi manusia, dengan upaya yang terkoordinasi, komitmen politik,

kerja sama internasional, dan partisipasi aktif pemerintah dan masyarakat. Penting diingat, standar HAM internasional bukan solusi tunggal, harus diterapkan bersama untuk masyarakat yang lebih adil dan setara.

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah analisis dokumen dan tinjauan literatur. Pertama, kami menganalisis instrumen hak asasi manusia internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam dokumen-dokumen ini menjadi dasar untuk memerangi kesenjangan global. Kami kemudian menggunakan tinjauan literatur untuk mengkaji dampak penerapan hukum hak asasi manusia internasional dalam mengurangi kesenjangan global.

Penelitian dan studi kasus ditinjau untuk memahami peran hukum hak asasi manusia internasional dalam mempromosikan keadilan dan kesetaraan di antara negara-negara di seluruh dunia. Temuan kami disajikan untuk lebih memahami kontribusi hukum hak asasi manusia internasional dalam mengatasi kesenjangan global, serta untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang mungkin timbul dari upaya-upaya ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai Fondasi

Perlindungan hak asasi manusia merupakan landasan terpenting untuk mengatasi kesenjangan global.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan berbagai perjanjian internasional memberikan kerangka hukum yang mengakui hak-hak dasar setiap individu. Melalui kebijakan dan peraturan yang memastikan hak-hak ini dihormati, kita dapat berupaya menciptakan kesetaraan di seluruh dunia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948, menetapkan landasan moral dan hukum bagi perlindungan hak asasi manusia.

Dokumen ini menegaskan hak-hak dasar seperti hak untuk hidup, kebebasan berekspresi, pendidikan dan perlakuan adil. Dengan mengakui hak-hak ini sebagai prinsip yang tidak dapat dicabut, komunitas internasional akan bekerja secara kolektif untuk mengatasi kesenjangan yang berakar pada pelanggaran hak asasi manusia.

Pentingnya perjanjian internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik tidak dapat diabaikan. Dokumen ini memberikan kerangka hukum bagi hak-hak sipil dan politik yang penting, termasuk hak atas kebebasan beragama, hak untuk tidak disiksa, dan hak atas persamaan di depan hukum. Menerapkan dan menghormati perjanjian-perjanjian ini merupakan langkah penting dalam membangun landasan hukum yang kuat untuk memerangi kesenjangan.

Selain itu, badan-badan seperti Mahkamah Internasional Hak Asasi Manusia menyediakan mekanisme bagi individu atau kelompok untuk mengajukan pengaduan mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Proses ini menciptakan tanggung jawab internasional dan memberikan landasan bagi masyarakat marginal untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Oleh karena itu, perlindungan hak asasi manusia bukan sekedar pernyataan retorik, namun memiliki implikasi nyata bagi terpeliharanya keadilan global.

Namun tantangan dalam implementasi perlindungan hak asasi manusia terletak pada perbedaan pendekatan dan upaya masing-masing negara.

Beberapa negara mungkin tidak sepenuhnya mengakui otoritas organisasi internasional, sehingga dapat mempengaruhi efektivitas perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, upaya diplomasi dan pendidikan perlu ditingkatkan untuk mencapai

kesepakatan global dalam penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam konteks kesenjangan global, melindungi hak asasi manusia tidak hanya berarti menjamin hak-hak individu tetapi juga mengembangkan kebijakan yang secara aktif mengurangi perbedaan antar negara. Hal ini mencakup upaya untuk memastikan bahwa sumber daya dunia didistribusikan secara adil dan bahwa negara-negara kurang berkembang mempunyai akses yang sama terhadap peluang ekonomi dan pembangunan.

Meskipun perlindungan hak asasi manusia memberikan landasan moral dan hukum yang kuat, permasalahan implementasi dan perselisihan internasional masih merupakan hambatan yang harus diatasi. Melalui dialog, kerja sama dan pendidikan, kita dapat memperkuat landasan perlindungan hak asasi manusia sebagai langkah awal yang kuat dalam memerangi kesenjangan global.

B. Penanganan Diskriminasi dan Marginalisasi

Memerangi diskriminasi dan marginalisasi merupakan bagian penting dari upaya mengatasi kesenjangan global. Diskriminasi berdasarkan faktor seperti ras, gender, dan kelas sosial dapat menjadi faktor penting dalam melanggengkan kesenjangan. Hukum hak asasi manusia internasional berfungsi sebagai panduan untuk memerangi segala bentuk diskriminasi dan berupaya untuk memastikan bahwa semua orang diperlakukan sama, tanpa memandang asal atau identitas mereka. Dalam konteks ini, Deklarasi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (DISBR) merupakan dokumen sentral. Diadopsi oleh PBB pada tahun 1965, dokumen ini menyatakan komitmen dunia terhadap penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial. DISBR mengakui hak untuk menikmati hak asasi manusia tanpa memandang ras atau etnis dan memberikan dasar hukum untuk memerangi diskriminasi ras yang dapat menyebabkan ketidaksetaraan.

Selain itu, ketidaksetaraan gender telah menjadi fokus utama dalam upaya mengatasi kesenjangan global. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) memberikan kerangka hukum untuk mengatasi segala bentuk diskriminasi gender dan memastikan bahwa hak-hak perempuan diakui dan dilindungi. Melalui implementasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, komunitas internasional berkomitmen untuk menciptakan kesetaraan bagi perempuan, mengurangi kesenjangan gender dan memerangi kesenjangan yang disebabkan oleh norma-norma sosial yang tidak adil. Namun memerangi diskriminasi bukanlah satu-satunya tugas organisasi internasional dan pemerintah. Peran masyarakat sipil dan organisasi hak asasi manusia sangatlah penting.

Gerakan hak asasi manusia dan organisasi non-pemerintah (LSM) berperan aktif dalam membela hak-hak orang yang mungkin dikucilkan atau didiskriminasi. Mereka tidak hanya bertindak sebagai pengawas yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia, namun juga agen perubahan yang mendorong perubahan budaya menuju inklusivitas dan keadilan. Lebih jauh lagi, pendidikan adalah kunci untuk mengatasi diskriminasi. Pendidikan hak asasi manusia yang menyeluruh dan menyeluruh dapat menghasilkan sikap dan pemahaman yang lebih baik terhadap perbedaan dan keberagaman. Masyarakat yang terdidik mengenai hak asasi manusia cenderung lebih peka terhadap dampak diskriminasi dan lebih bersedia berpartisipasi dalam upaya mengatasi kesenjangan. Langkah-langkah yang terkoordinasi antar negara dan kerja sama antar lembaga penting untuk mengatasi masalah diskriminasi dan marginalisasi. Upaya bersama untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan inklusif yang mengakui dan melindungi hak-hak semua orang tanpa kecuali akan menggerakkan dunia menuju masyarakat yang lebih setara dan adil.

C. Penguatan Sistem Hukum Nasional

Memperkuat sistem hukum dalam negeri merupakan elemen kunci dalam melindungi hak asasi manusia dan mengatasi kesenjangan global. Sistem hukum yang kuat dan adil menjadi dasar bagi penegakan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang efektif. Selain pembangunan sosial dan hubungan kekuasaan global, penguatan sistem hukum nasional merupakan langkah strategis untuk mengatasi tantangan kesenjangan yang semakin kompleks.

1. Mereformasi undang-undang hak asasi manusia

Mereformasi undang-undang agar sejalan dengan standar hak asasi manusia internasional merupakan langkah pertama yang penting. Negara-negara dapat memastikan bahwa undang-undang mereka konsisten dengan prinsip-prinsip Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan instrumen hak asasi manusia lainnya. Reformasi ini dapat mencakup perbaikan definisi hak-hak individu dan sanksi yang lebih keras terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

2. Penguatan sistem peradilan

Kekuatan sistem peradilan dalam menangani kasus HAM merupakan indikator penting kesehatan sistem hukum suatu negara. Dengan melatih para hakim, pengacara dan pejabat peradilan serta membentuk pengadilan khusus untuk kasus-kasus hak asasi manusia, negara-negara dapat meningkatkan efektivitas dan kredibilitas sistem peradilan mereka. Hal ini akan mencegah impunitas dan meningkatkan akses terhadap keadilan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia.

3. Pendidikan Hukum Hak Asasi Manusia

Memasukkan pendidikan hak asasi manusia ke dalam kurikulum pendidikan hukum merupakan langkah penting dalam menghasilkan generasi pengacara masa depan yang berkomitmen terhadap nilai-nilai hak asasi manusia. Pelatihan ini memastikan bahwa para praktisi hukum dibekali untuk memahami dampak kesenjangan dan memperjuangkan keadilan dalam profesi mereka.

4. Mekanisme Perlindungan

Negara dapat membentuk lembaga perlindungan hak asasi manusia yang independen untuk memantau, menyelidiki dan membuat rekomendasi mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Keberadaan lembaga-lembaga tersebut dapat memberikan kesempatan bagi individu dan kelompok yang merasa haknya dilanggar untuk mendapatkan keadilan tanpa hambatan politik atau administratif.

5. Kerjasama Penegakan Hukum Internasional

Kerjasama antar Negara dalam penegakan hukum hak asasi manusia dapat memperkuat upaya nasional. Berbagi informasi, pelatihan bersama dan kerja sama dalam penyelidikan insiden internasional dapat menimbulkan tekanan dan tanggung jawab yang lebih besar.

6. Peran aktif pemerintah dalam implementasi

Pemerintah harus berperan aktif dalam implementasi kebijakan hak asasi manusia. Hal ini termasuk mengalokasikan sumber daya yang tepat, memperkuat penegakan hukum, dan melibatkan masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan. Keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah dapat mengurangi peluang terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Meskipun langkah-langkah ini dapat menjadi dasar untuk memperkuat sistem hukum dalam negeri, kami mencatat bahwa penerapan kebijakan dan reformasi memerlukan dukungan penuh dari pemerintah, masyarakat sipil, dan organisasi internasional. Hanya dengan keterlibatan semua pihak kita dapat mencapai perubahan nyata dalam sistem hukum nasional yang mampu mengatasi kesenjangan global.

D. Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan

Mengarusutamakan pembangunan berkelanjutan merupakan strategi penting untuk mengatasi kesenjangan global. Konsep ini menekankan pada keterpaduan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup ke dalam seluruh aspek pembangunan. Standar hak asasi manusia internasional memberikan dasar untuk mendorong pengarusutamaan pembangunan yang adil dan berkelanjutan sebagai langkah nyata menuju pengurangan kesenjangan di tingkat global.

- a. Agenda 2030 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Implementasi TPB yang tertuang dalam Agenda 2030 merupakan tolok ukur utama dalam upaya pengurangan kesenjangan. Undang-undang hak asasi manusia memberikan kerangka kerja untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak hanya memberikan manfaat bagi kelompok tertentu, namun juga mencakup seluruh masyarakat, termasuk mereka yang berada di garis depan kesenjangan.
- b. Hak Asasi Manusia Ekonomi, Sosial dan Budaya Yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusiameliputi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- c. Negara-negara diharapkan memastikan bahwa kebijakan pembangunan mereka mencakup aspek-aspek ini secara memadai. Hal ini mencakup hak atas pekerjaan yang layak, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, dan hak atas lingkungan yang sehat.
- d. Inklusi masyarakat sipil dan partisipasi publik Pertimbangan yang konsisten terhadap pembangunan berkelanjutan memerlukan partisipasi aktif masyarakat sipil. Masyarakat yang terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan dapat memberikan perspektif yang lebih luas dan memastikan bahwa kebijakan pembangunan mencerminkan kebutuhan nyata dari berbagai lapisan masyarakat.
- e. Pemberdayaan Perempuan Hak asasi manusia menjadi dasar pemberdayaan perempuan. Mengubah norma-norma budaya dan kebijakan-kebijakan yang menghambat perempuan dalam pendidikan, pekerjaan dan partisipasi politik merupakan langkah penting dalam memerangi ketidaksetaraan gender. Pemberdayaan perempuan mempunyai dampak positif yang signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan.
- f. Mengatasi kesenjangan di negara-negara berkembang Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan harus fokus pada negara-negara berkembang, yang mungkin lebih rentan terhadap kesenjangan.
- g. Bantuan internasional dan kerja sama global sangat penting untuk memastikan negara-negara ini memiliki sumber daya dan dukungan yang cukup untuk menerapkan kebijakan pembangunan yang adil.
- h. Pendidikan dan kesadaran masyarakat Hak asasi manusia internasional menjadi dasar pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai pembangunan berkelanjutan. Pelatihan ini tidak hanya memberikan pemahaman mengenai hak asasi manusia, namun juga bagaimana individu dan masyarakat dapat berkontribusi dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- i. Analisis Dampak Pembangunan. Negara-negara harus secara teratur melakukan penilaian dampak pembangunan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak memperburuk kesenjangan. Mekanisme ini membantu mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan perubahan dan memberikan dasar untuk penyesuaian kebijakan. Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan bukanlah tujuan yang cepat, namun merupakan sebuah perjalanan panjang yang memerlukan partisipasi penuh dari semua pihak yang terlibat. Dengan menerapkan prinsip hak asasi manusia, negara dapat memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan benar-benar berdampak dan

meningkatkan kualitas hidup setiap individu, sehingga mengurangi kesenjangan secara keseluruhan.

E. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Internasional

Mekanisme penyelesaian sengketa internasional memainkan peran penting dalam menjaga perdamaian, keadilan dan mengurangi kesenjangan antar negara. Hukum hak asasi manusia internasional memberikan dasar bagi pengembangan dan penerapan mekanisme yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan dan perselisihan yang mendukung prinsip-prinsip hak asasi manusia.

1) Mahkamah Internasional Hak Asasi Manusia.

Keberadaan pengadilan internasional, seperti Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa dan Pengadilan Kriminal Internasional, memberikan landasan bagi penyelesaian sengketa terkait pelanggaran hak asasi manusia. Keputusan yang diambil oleh pengadilan tersebut tidak hanya menjamin keadilan bagi individu yang terkena dampak, namun juga menjadi preseden hukum yang dapat membentuk norma perilaku internasional.

2) Mediator dan Konsiliasi.

Mediasi dan konsiliasi merupakan cara yang efektif untuk menyelesaikan perselisihan internasional tanpa memerlukan prosedur hukum yang panjang. Dalam konteks hak asasi manusia, mediasi dapat memberikan ruang bagi negara-negara untuk menemukan solusi damai dan mencegah pelanggaran hak asasi manusia lebih lanjut. Organisasi internasional seperti PBB dapat berperan sebagai mediator atau koordinator dalam proses ini.

3) Arbitrase Internasional.

Arbitrase internasional dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan antara negara dan pelaku ekonomi internasional. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat menciptakan stabilitas hukum yang mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, dari perspektif hak asasi manusia, perhatian khusus harus diberikan untuk memastikan bahwa keputusan arbitrase tidak mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

4) Diplomasi Hak Asasi Manusia.

Diplomasi Hak Asasi Manusia merupakan cara yang efektif untuk menyelesaikan perselisihan internasional. Negosiasi dan dialog antar negara dapat menciptakan saling pengertian mengenai standar hak asasi manusia dan memberikan solusi yang menghormati hak individu. Upaya diplomasi seperti ini juga dapat membangun kepercayaan antar negara dan mendorong kerja sama untuk mengatasi kesenjangan.

5) Peran aktif organisasi internasional.

Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa memainkan peran penting dalam menyelesaikan perselisihan internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa, melalui badan-badan seperti Dewan Keamanan dan Mahkamah Internasional, dapat berperan dalam memfasilitasi dialog, merancang resolusi, dan memberikan penegakan hukum untuk melaksanakan keputusan yang dihasilkan.

6) Forum dialog multilateral.

Forum multilateral, seperti pertemuan puncak dan konferensi internasional, menyediakan forum untuk mengatasi kesenjangan melalui dialog antar negara. Diskusi dan negosiasi dalam forum ini membantu menyelesaikan konflik, mengidentifikasi penyebab masalah, dan mengembangkan solusi yang menghormati hak asasi manusia.

7) Mekanisme Pemantauan Hak Asasi Manusia.

Komisi hak asasi manusia berdasarkan perjanjian internasional menyediakan mekanisme untuk memantau kepatuhan negara terhadap kewajiban hak asasi manusia. Mekanisme ini memungkinkan individu atau organisasi untuk mengajukan pengaduan

dan menyampaikan laporan independen mengenai penerapan hak asasi manusia di tingkat nasional. Mekanisme penyelesaian perselisihan internasional telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengatasi kesenjangan, namun tantangannya masih ada. Ketidaksepakatan antar negara, kurangnya kepatuhan, dan tindakan proteksionis dapat membatasi efektivitas mekanisme ini. Oleh karena itu, memastikan bahwa penyelesaian sengketa internasional sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan berkontribusi terhadap pengurangan kesenjangan memerlukan kerja sama dan partisipasi aktif semua pihak, termasuk masyarakat sipil dan sektor swasta.

KESIMPULAN

Peran hukum hak asasi manusia internasional terbukti penting dalam memerangi kesenjangan global. Berdasarkan hasil dan argumen yang disampaikan, perlindungan hak asasi manusia, pemberantasan diskriminasi, penguatan sistem hukum nasional dengan mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan, mekanisme penyelesaian sengketa internasional, dan berbagai aspek lainnya penting untuk mengurangi kesenjangan dasar.

Hukum hak asasi manusia internasional, khususnya hukum yang terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan perjanjian hak asasi manusia lainnya, memberikan dasar moral dan hukum untuk melindungi hak-hak dasar setiap individu. Namun, di beberapa negara, tantangan penerapan dan kepatuhan masih merupakan hambatan yang harus diatasi untuk mencapai keadilan global yang sesungguhnya.

Memerangi diskriminasi dan marginalisasi adalah upaya tulus untuk menciptakan kesetaraan dalam masyarakat. Hukum hak asasi manusia internasional memberikan dasar untuk memerangi kesenjangan yang disebabkan oleh diskriminasi berdasarkan ras, gender dan kelas sosial melalui kebijakan dan tindakan nyata. Penguatan sistem hukum dalam negeri merupakan langkah strategis menuju perlindungan hak asasi manusia.

Reformasi peradilan, peningkatan kapasitas sistem peradilan, dan pelatihan hak asasi manusia merupakan elemen penting dalam membangun sistem yang adil dan efektif.

Pertimbangan yang konsisten terhadap pembangunan berkelanjutan menciptakan jalan menuju masyarakat yang lebih setara. Dengan memasukkan dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan hidup, hukum hak asasi manusia internasional mendorong pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada kesejahteraan dan hak-hak semua orang.

Mekanisme penyelesaian sengketa internasional memberikan cara untuk menyelesaikan perselisihan dan perselisihan dengan mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Melalui pengadilan internasional, mediasi, dan forum dialog multilateral, hak asasi manusia berperan dalam membangun perdamaian dan keadilan di dunia. Namun jalan untuk mengatasi kesenjangan global tidaklah mudah.

Tantangan seperti perselisihan internasional, kurangnya kepatuhan, dan perubahan politik dapat menghambat kemajuan. Oleh karena itu, kerja sama internasional, pendidikan publik, dan peningkatan kesadaran hak asasi manusia merupakan kunci untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan setara. Oleh karena itu, hukum hak asasi manusia internasional memberikan landasan yang kuat untuk memerangi kesenjangan global. Melalui keterlibatan global, tindakan nyata dan kebijakan inklusif, visi masyarakat berdasarkan keadilan, kesetaraan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia semua individu di seluruh dunia dapat diwujudkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, W., & Fikriana, A. (2023). Hukum Hak Asasi Manusia; Perspektif Internasional Tentang Kesenjangan Yang Perlu Disikapi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(1), 35-46.
- Donnelly, J. (2013). "Universal Human Rights in Theory and Practice." Cornell University Press.
- Gurinda, N. C. H. (2019). Peran PBB Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Kajian Hukum Internasional. *Lex Et Societatis*, 7(9).
- J. V. (2024). Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Hukum Internasional. *Nusantara Journal of Multidisciplinary Science*, 2(1), 1-13.
- Langford, M. (2013). *Social Rights Jurisprudence: Emerging Trends in International and Comparative Law*.
- Marentek, Y. S. (2018). Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional. *Lex Privatum*, 6(9).
- Marzuki, I., & Faridy, F. (2020). Relevansi Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dengan Agenda Reformasi: Dimensi Nasional Dan Internasional. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), 350-359.
- Nurdin, M. N. (2023). Etika Politik dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia di kehidupan global.
- Philip, C. (2016). Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional. *Lex administratum*, 4(2).
- Putri, N. G. A., Avita, F. D., & Putri, H.
- R. (2008). *International Human Rights in Context: Law, Politics, Morals*.
- Sinaga, T. B. (2018). Peranan Hukum Internasional Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Unsrat*, 1(2), 94-105.
- Steiner, H. J., Alston, P., & Goodman,
- Warjiyati, S. (2018). Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, 15(1), 123-138.